



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD ARIF SAMBODO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 185136

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.136.454.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 398 m²/192 m² di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 846.454.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m²/120 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 709.090.000**

1. MOTOR, HONDA D1B02N12L2A/T/SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 258.200.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER SPORT A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 270.440.000
5. MOTOR, YAMAHA GEAR B3WS A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.450.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 44.648.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 762.152.371****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 2.652.344.371****III. HUTANG****Rp. 34.833.501****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 2.617.510.870**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.